



Pendampingan Pengelolaan Keuangan pada BUMDes Desa Lukpanenteng Kabupaten Banggai Kepulauan

**Muhammad Ilham Pakawaru¹, Yuldi Mile², Mohammad Iqbal Bakry³, Rika Febby
Rhamadhani⁴ & Muhammad Bashri Bas⁵**

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia

E-mail: pakawaruilham4@gmail.com¹, yuldimile@untad.ac.id², iqbalbakry01@yahoo.com³, rikafebbr@untad.ac.id⁴,
basri.bazz@untad.ac.id⁵*

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2025-11-20

Revised : 2025-11-28

Accepted : 2025-11-29

KEYWORDS

Accountable, BUMDes,
Financial Management,
Socialization, Transparent

KATA KUNCI

Akuntabel, BUMDes,
Pengelolaan Keuangan,
Sosialisasi, Transparan

ABSTRACT

The Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Lukpanenteng Village plays a central role in strengthening the village economy. The background to this service is the low level of understanding among BUMDes managers regarding financial transparency and accountability, which results in unstructured transaction recording and budget planning. In addition, the community's lack of understanding of the role of BUMDes has led to low levels of active participation. The activities were designed with a socialization and practical training approach involving BUMDes managers and the village community. The implementation process included the delivery of materials and intensive training on transaction recording, budget preparation, and monthly financial reporting. The results showed a significant increase in the managers' financial management skills, resulting in more structured recording. The financial transparency of BUMDes improved as regular reports were published. The village community showed more active participation, both as consumers, suppliers, and contributors of suggestions. Thus, this intervention succeeded in strengthening the capacity of BUMDes as the main pillar of a transparent and accountable village economy.

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lukpanenteng berperan sentral dalam penguatan ekonomi desa. Latar belakang dari pengabdian ini adalah rendahnya pemahaman pengelola BUMDes mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang berakibat pada pencatatan transaksi dan perencanaan anggaran yang tidak terstruktur. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran BUMDes menyebabkan rendahnya partisipasi aktif mereka. Kegiatan dirancang dengan pendekatan sosialisasi dan pelatihan praktis yang melibatkan pengelola BUMDes dan masyarakat desa. Proses pelaksanaan mencakup penyampaian materi dan pelatihan intensif mengenai pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, serta pembuatan laporan keuangan bulanan. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan terkait pemahaman dalam pengelolaan keuangan BUMDes melalui forum diskusi dan juga pendampingan langsung dalam penyusunan keuangannya melalui hasil pencatatan yang lebih terstruktur atas proses pelaporannya. Transparansi keuangan BUMDes meningkat karena laporan rutin yang dipublikasikan. Serta. Masyarakat desa menunjukkan partisipasi yang lebih aktif, baik sebagai konsumen, pemasok, maupun penyumbang saran. Dengan demikian, intervensi ini berhasil memperkuat kapasitas BUMDes sebagai pilar utama perekonomian desa yang transparan dan akuntabel.

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018) meliputi empat prinsip utama: transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan menurut PKDSP (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme memberbase dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan definisi pengelolaan keuangan secara umum, yaitu serangkaian kegiatan sistematis yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dana. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya finansial, baik untuk individu maupun organisasi, demi menjamin pencapaian tujuan ekonomi jangka panjang, seperti stabilitas arus kas dan perlindungan aset (Indahwati, 2023; Mulyadi, 2019; Nugroho, 2020).

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun (2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun (2005) tentang Desa Pasal 78, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah didasarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang didirikan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya serta aset desa dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Andi et al., 2022; Wulandari & Wardani, 2024; Yulianto & Rita, 2023). BUMDes yang merupakan program andalan desa terlahir sebagai pendekatan yang dalam memperkuat potensi dan kompetensi sumber daya yang dimiliki desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga kemandirian bangsa mengemban misi tidak hanya untuk mengejar keuntungan, namun juga bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat di desa (Arifin et al., 2020; Hilmawan et al., 2023; Somiartha et al., 2024). BUMDes harus menciptakan ide baru berdasarkan potensi desa dengan tujuan mampu memberikan nilai tambah masyarakat. Sehingga BUMDes dapat mengatasi masalah sosial dan mengurangi kemiskinan (Darwita & Redana, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memegang peran strategis sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa, termasuk di Desa Lukpanenteng, Kabupaten Banggai Kepulauan. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun potensi

besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena berbagai tantangan. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan pengelolaan keuangan dan sumber daya. Para pengelola BUMDes belum sepenuhnya memahami konsep keuangan yang transparan dan akuntabel, yang berdampak pada pencatatan transaksi, perencanaan anggaran, dan pengelolaan laba yang tidak sistematis.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola BUMDes dan observasi lapangan, ditemukan bahwa banyak usaha yang dikelola oleh BUMDes belum berkembang secara optimal, disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang baik, yang mana kebanyakan dari pengelola maupun pelaku usaha hanya melakukan pencatatan berdasarkan pada aktivitas rutin melalui pembukuan sederhana atas penjualan, maupun pembelian dengan perolehan informasi pada pelaporan penggunaan dana oleh pengguna anggarannya, sehingga belum mencantumkan aspek-aspek penting dalam pelaporan keuangan yang seharusnya tercatat dalam regulasi yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha kuliner, toko kebutuhan sehari-hari, dan pariwisata lokal yang dikelola BUMDes. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya partisipasi masyarakat karena mereka belum menyadari pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, diperlukan intervensi untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, khususnya dalam manajemen keuangan, agar BUMDes dapat beroperasi lebih efisien, berkelanjutan, dan menjadi pilar ekonomi yang kuat.

Program pengabdian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan manajemen keuangan kepada para pengelola BUMDes. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan keterampilan pengelola dalam pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan dapat meningkat. Dengan pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif berdiskusi, membagikan pengalaman dan merancang Dengan tata kelola keuangan yang lebih baik, BUMDes di Desa Lukpanenteng diharapkan mampu mengoptimalkan potensi usahanya, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya, berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Metode

Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam pengabdian ini menggunakan model pendekatan partisipatif yang berfokus pada sosialisasi langsung. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah utama BUMDes di Desa Lukpanenteng, yaitu pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan kurangnya transparansi. Pendekatan ini dilaksanakan dalam empat tahapan yang saling berkesinambungan.

1. Tahap pertama, analisis dan perencanaan, dimulai dengan menganalisis sistem keuangan BUMDes melalui wawancara dan observasi untuk menyusun modul sosialisasi yang relevan. Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis berdasarkan kemampuan dalam memahami secara kontekstual proses pengelolaan keuangan BUMDes. Tim pengabdian berfokus pada tingkat pemahaman yang dicapai melalui proses diskusi dengan konteks pemahaman substantif yang disampaikan peserta dalam forum diskusi terkait pengelolaan keuangan dan tidak dilakukannya pengukuran dalam proses pre-test dan post-test seperti beberapa pengabdian lainnya.
2. Setelah itu, pada tahap pelaksanaan sosialisasi, tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa menyampaikan materi secara intensif, mencakup pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan sederhana.
3. Selanjutnya, tahap implementasi dan pendampingan memfasilitasi penerapan sistem pencatatan keuangan dan memberikan bimbingan berkelanjutan agar pengelola BUMDes mampu mempraktikkan ilmu yang didapat.
4. Terakhir, tahap evaluasi dan keberlanjutan dilakukan untuk mengetahui peningkatan kapasitas pengelola serta memastikan program dapat berjalan mandiri di masa depan.

Pendekatan ini juga menekankan keterlibatan aktif mitra (pengelola dan masyarakat desa) dari awal hingga akhir, yang penting untuk membangun rasa kepemilikan dan menjamin keberlanjutan program.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan Mitra BUMDes LukPanenteng

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat berlangsung pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, Pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai bertempat di Kantor Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan para perangkat desa. Tim pengabdian secara keseluruhan memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan keuangan meliputi pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, serta pembuatan laporan keuangan bulanan. Setelah sosialisasi, diadakan diskusi dan pendampingan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi peserta pengabdian dalam mengelola keuangan BUMDes.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Peserta

Peserta sosialisasi pengelolaan keuangan di Desa Lukpanenteng adalah para perangkat desa dan para pengelola BUMDes yang memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Mereka adalah individu yang terlibat langsung dalam operasional usaha BUMDes. Meskipun memiliki peran penting sebagai motor penggerak ekonomi desa, sebagian besar pengelola ini belum sepenuhnya memahami teknis pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, peserta sosialisasi ini adalah individu yang berada di garis depan pengelolaan keuangan BUMDes, namun masih memerlukan pendampingan dan bimbingan praktis untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Mereka adalah mitra strategis yang memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi desa jika dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Realisasi Kegiatan

Pada tahapan wawancara dan observasi, tim pengabdian mendengarkan keluhan mitra mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan, terutama dalam pencatatan transaksi dan perencanaan

anggaran yang tidak terstruktur serta pada pengetahuan pengelolaan keuangan hingga penyajian laporan keuangan BUMDes. Setelah dilakukan tahapan wawancara dan observasi, maka selanjutnya dilakukan tahapan pelaksanaan sosialisasi. Namun sebelum masuk pada tahapan tersebut, tim pengabdian melakukan koordinasi merancang kegiatan pengabdian, menyusun materi pengabdian sesuai dengan analisis kebutuhan mitra.

Program pengabdian ini memaparkan materi mengenai praktik pengelolaan keuangan BUMDes. Materi utamanya meliputi pencatatan transaksi untuk membuat laporan keuangan. Sosialisasi ini juga mencakup teknik pencatatan transaksi BUMDes sesuai Standar Akuntansi BUMDes. Entitas wajib memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten pada setiap transaksi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru bagi pengelola BUMDes di Desa Lukpanenteng, sebagaimana hasil survei awal tim pengabdian dalam menemukan permasalahan yang dihadapi mitra.

Selain kegiatan sosialisasi, program pengabdian ini juga memberikan dan menguatkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dengan Focus Discussion Group (FGD) mengenai pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Realisasi kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa intervensi yang fokus pada sosialisasi dan pendampingan manajemen keuangan telah menghasilkan dampak positif pada pemahaman perangkat desa dan perangkat pengelola BUMDes.

Selain sosialisasi, dan FGD, tim pengabdian juga memberikan pelatihan manajemen keuangan untuk meningkatkan keterampilan pengelola BUMDes. Indikator utamanya adalah tercapainya target pengelola mampu mengisi buku kas secara mandiri dan tersusunnya minimal satu laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan. Berbagai luaran dan pencapaian yang dihasilkan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas Internal

Peningkatan keterampilan pengelola dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menciptakan sistem akuntabilitas yang lebih baik. Hal ini mengukuhkan teori bahwa kapasitas manajerial yang solid adalah prasyarat utama untuk keberlanjutan ekonomi desa.

b. Peningkatan Kepercayaan Publik

Transparansi keuangan melalui publikasi laporan terbukti efektif dalam menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Kondisi

ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis komunitas yang menekankan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan. Masyarakat kini tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemasok dan pengawas, memperkuat sinergi antara BUMDes danarganya.

c. Keberlanjutan Program

Dengan fondasi yang sudah terbentuk, yaitu adanya sistem pencatatan dan laporan keuangan bulanan, BUMDes kini memiliki bekal untuk melanjutkan praktik baik ini secara mandiri. Meskipun pendampingan lanjutan tetap dibutuhkan, program ini telah sukses menciptakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan BUMDes sebagai pilar ekonomi Desa Lukpanenteng.

Sesi Tanya Jawab 2 (Dua) Arah

Pada metode pendekatan FGD (Focus Group Discussion) dilakukan sharing pengalaman dalam proses pembelajaran dengan cara: a). Memberikan kesempatan kepada mitra untuk saling berbagi pengalaman, gagasan, ide, dan mengklarifikasi sudut pandang yang berbeda, b) Membantu mitra mengenali apa yang mereka telah lakukan dan hal-hal yang mitra tidak ketahui. c) Membantu mitra menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka temui dalam pengalaman sebagai pengelola BUMDes.

Yulianto & Rita, (2023) mengungkapkan bahwa perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha. Melalui kemampuan pengelolaan keuangan yang dimiliki suatu badan usaha dapat meningkatkan kinerja bisnis. Siswanti & Halida, (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan keuangan yang baik akan menuntun individu dalam pengambilan keputusan, melakukan kontrol keuangan serta membuat perencanaan keuangan yang baik.

Sesi ini menampilkan interaksi yang sangat aktif. Pengelola BUMDes dan perangkat desa antusias mengajukan pertanyaan penting mengenai masalah keuangan yang mereka hadapi. Isu utama yang diangkat meliputi pencatatan yang tercampur antara dana BUMDes dengan keuangan pribadi atau desa, kurangnya pemahaman prinsip akuntansi dasar, pencatatan yang tidak sistematis sehingga rawan kesalahan data, ketiadaan format laporan keuangan standar yang menghambat pengukuran kinerja dan pendanaan, tidak adanya publikasi laporan yang mengurangi kepercayaan publik, serta pengawasan kas dan inventaris yang lemah sehingga berisiko tinggi terhadap kerugian atau penyalahgunaan.

Pengabdian ini mengungkapkan pentingnya penerapan pelatihan teknis yang secara konsisten dilakukan pada pengelola BUMDes dan keterlibatan tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam memantau aktivitas operasional BUMDes untuk meningkatkan pencapaian potensi desa membangun perekonomian yang stabil dengan mengelola keuangan secara sistematis menjadi kunci utama keberhasilan yang tidak dapat diukur secara angka dan persepsi semata melainkan berdasarkan praktik dan kemampuan teknis nyata yang dimiliki perangkat desa.



Gambar 3. Sesi tanya jawab Peserta – Tim Pengabdian



Gambar 4. Sesi tanya jawab Peserta – Tim Pengabdian

Antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan dalam forum diskusi pada pelaksanaan pengabdian membuktikan bahwa program sosialisasi ini menyentuh poin-poin krusial yang dibutuhkan oleh pengelola BUMDes terkait dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada regulasi dalam mencapai transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran para pemegang kepentingan desa yang tertuang pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 melalui penggunaan dana desa dalam menggali potensi dan membangun perekonomian desa dengan BUMDes setempat. Diskusi yang terjalin memungkinkan tim pengabdian untuk memberikan solusi yang lebih spesifik dan relevan, sekaligus memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

4. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat di Desa Lukpanenteng telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peningkatan kapasitas melalui pemahaman substantif dalam proses pengelolaan keuangan desa merupakan hasil nyata dari kegiatan ini, terbukti dari kemampuan mereka dalam mencatat transaksi, menyusun anggaran, dan menyajikan laporan keuangan bulanan secara sistematis yang sebelumnya terbatas pada Tindakan pelaporan sederhana. Selain itu, transparansi keuangan juga mengalami peningkatan seiring dengan publikasi laporan secara terbuka dan partisipasi aktif masyarakat dalam rapat evaluasi bulanan. Peningkatan transparansi ini secara langsung berdampak pada peningkatan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, yang tercermin dari partisipasi mereka sebagai konsumen, pemasok bahan baku, maupun pemberi masukan. Secara keseluruhan, intervensi ini menunjukkan bahwa pendampingan sederhana dalam manajemen keuangan mampu memperkuat fondasi keberlanjutan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa yang lebih andal dan akuntabel.

Pengabdian masa mendatang dapat menjadikan model pengabdian ini menjadi landasan untuk dapat mengintervensi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam menggali potensi desa demi pengembangan ekonomi desa dan masyarakat setempat. Kegiatan ini merekomendasikan pelatihan teknis secara berkesinambungan untuk secara konsisten dapat memastikan bahwa pelaksanaan substansi yang diperoleh dalam pelaksanaan pendampingan memiliki luaran yang dapat memperkaya wawasan perangkat desa untuk mengembangkan potensi desanya dengan praktik transparansi, akuntabel, partisipatif masyarakat serta kedisiplinan dalam penggunaan anggaran desa dalam memprioritaskan kapasitas desa dan kepercayaan masyarakat di dalam pelaksanaannya.

5. Referensi

- Andi, W. M., Lestari, D., Semara, I. M. T., Parwati, K. S. M., & Wijaya, N. S. (2022). Meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes pada manajemen bisnis dan manajemen keuangan BUMDes “Panca Artha Mandiri” Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh Denpasar Bali. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(1), 49–56.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., & Ariutama, G.

- A. (2020). Village fund, village-owned enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394.
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus: Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 51–60.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159.
- Indahwati, R. (2023). The quality of village-owned enterprises' financial statement. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 337–358.
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Indonesia, P. R. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Pasal 78)*.
- Indonesia, P. R. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Mulyadi, D. (2019). *Manajemen keuangan desa dan badan usaha milik desa (BUMDes)*. Salemba Empat.
- Nugroho, T. W. (2020). Performance analysis of village-owned enterprises based on financial and management aspects in Blitar Regency, East Java. *Habitat*, 31(2), 64–77.
- PKDSP, D. P. N. P. K. D. S. P. (2007). *Buku panduan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Siswanti, I., & Halida, A. M. (2020). Financial knowledge, financial attitude, and financial management behavior: Self-control as mediating. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(1), 105–132.
- Somiartha, P., Utama, I. M. S., Sudibia, I. K., & Dewi, M. H. U. (2024). Determinants of performance of village-owned enterprises in improving village development performance. *International Journal of Professional Business Review*, 9(1), 17.
- Wulandari, F., & Wardani, M. K. (2024). Open innovation in village-owned enterprises: The role of entrepreneurial orientation in improving financial and social performance. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2350079.
- Yulianto, M. A., & Rita, M. R. (2023). Mediasi perilaku pengelolaan keuangan dalam pengaruh fintech dan literasi keuangan terhadap kinerja usaha. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 7(2), 212–232.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).